

**ANALISA IMPLEMENTASI SMART CITY MADANI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DALAM UPAYA SINERGITAS PROGRAM ASEAN SMART CITIES NETWORK (ASCN) 2030**

**Hizra Marisa<sup>1</sup>, Andree<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Abdurrah, Pekanbaru.

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Abdurrah, Pekanbaru.

Corresponding e-mail: hizra.marisa@univrab.ac.id

**ABSTRACT**

*In this research will focus on the Analysis of the Smart City Madani Implementation in Pekanbaru City as an effort to synergize the ASEAN Smart Cities Network 2030 Program. The development of Smart City has expanded in various parts of the world. It is contained in The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has also begun to discuss with Singapore, based on the establishment of the ASEAN Smart City Network (ASCN) 2030. This agreement is related to Indonesian government currently doing with the Movement Towards 100 Smart Cities that encourage the use of technology for advance some cities in order to realize more effective, transparent and reliable governance. As one of the largest cities in Indonesia, of course, rapid development is needed to advance the city, one of them is Pekanbaru. The development of Pekanbaru is achieved with the following 5 points, eg Improving Basic Infrastructure, where to advance Pekanbaru, there are 3 basic infrastructures that must be addressed and developed, eg transportation, electricity and telecommunications; Smart city approach, Pekanbaru approaches to encourage city to become smart cities with the green city approach; Developing the area; Community development; and the formation of quality communities.*

**Keywords:** *Smart City; ASEAN Smart Cities Network; Synergy; Pekanbaru City; Implementation, Globalization.*

## **A. Pendahuluan**

Pembangunan dan pengembangan Kota Cerdas (Smart City) telah meluas di berbagai belahan dunia. Tidak ketinggalan perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) juga telah mulai membahas dengan usulan Singapura terkait pembentukan ASEAN Smart City Network (ASCN). Menarik ketika negara Singapura yang juga hanya sebuah kota dengan penduduk sekitar 6 juta menginisiasi suatu pembangunan Kota Cerdas di antara ratusan (ribuan) kota dan kabupaten di ASEAN yang bervariasi mulai dengan kota maju hingga kabupaten yang masih berjuang untuk keberlanjutannya.

*Smart city* adalah sebuah impian dari semua kota-kota besar di seluruh dunia. Perencanaan *Smart City* adalah agenda global sebagai respon konseptual dan praktis terhadap berbagai krisis perkotaan di dunia yang semakin mengawatirkan, untuk mengembalikan hubungan antara manusia, ruang binaan dan ruang alami yang lebu harmonis, sehingga tidak saling menyakiti. *Smart city* adalah sebuah konsep Kota Cerdas yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Spesifikasi Konsep *Smart City* sebagai berikut:

- a. *Smart Government* (pemerintahan pintar): kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah Good Governance. Yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum.
- b. *Smart Economy* (Ekonomi pintar): maksudnya ini adalah semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal.
- c. *Smart Mobility* (mobilitas pintar): pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik.
- d. *Smart People* (orang/masyarakat pintar): pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi, modal manusia maupun modal sosial.
- e. *Smart Living* (Lingkungan pintar): lingkungan pintar itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik.
- f. *Smart Live* (Hidup pintar): berbudaya, berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya).

*Smart City* merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. *Smart City* dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. Konsep ini menekankan pada tiga konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien dan ketiga *smart city* diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga.

Pemerintah Daerah melalui inovasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Bab XXI bertajuk Inovasi Daerah. Dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23/2014, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi sebagaimana dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi

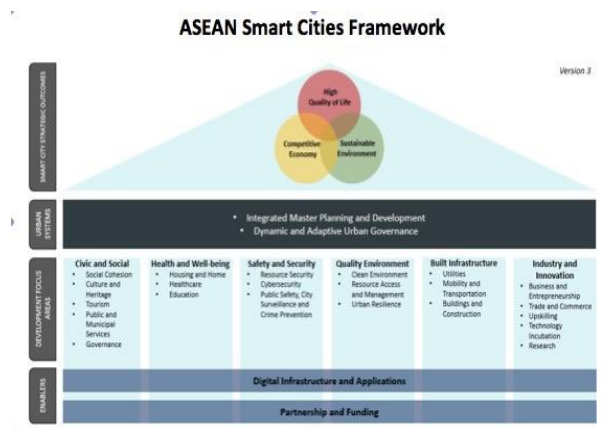
nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. *Smart City* atau kota cerdas didefinisikan sebagai sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada didalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (Prof. Suhono Harso Supangkat dkk).

ACSN merupakan salah satu program ASEAN dimana perkumpulan negara ASEAN telah merencanakan suatu jejaring antar kota di ASEAN dengan masing masing Negara mengirim 3 kota pada awalnya. Setiap negara mengirim satu Kota Ibu Kota Negara dan 2 kota lainnya. Singapura dan Brunei mungkin hanya kirim satu karena Negara adalah Kota. Sementara Singapura menjadi negara inisiator tentu bisa mengusulkan berbagai kegiatan untuk suatu tujuan tertentu.

ASCN sebuah wadah kolaboratif yang ditujukan untuk mensinergikan upaya pembangunan kota pintar di sepanjang Asia Tenggara dengan memfasilitasi kerjasama pada pembangunan kota cerdas, mengkatalisasikan proyek-proyek perbankan dengan sektor swasta, dan mengamankan pendanaan dan dukungan dari mitra-mitra luar Asia Tenggara. ASEAN Smart Cities Network memiliki

beberapa kinerja yang harus dicapai oleh tiap negara anggota ASEAN, dimana ada 6 (enam) sector yang harus ditingkatkan untuk mencapai ASCN tersebut yaitu *Civil and Social, Health and Well-being, Safety and Security, Quality Environment, Built Infrastructure* dan *Industry and Innovation*. Keenam sector itu dapat dijelaskan didalam grafik tabel dibawah:

**Tabel 1. ASEAN Smart Cities Framework**



Program ASCN disambut baik oleh Indonesia yang sedang mengembangkan Gerakan Menuju 100 Smart Cities, dimana didalamnya mendorong penggunaan teknologi untuk memajukan kota guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan terpercaya. Hal ini merupakan wujud dari implementasi ASCN. Meskipun ada tiga Kota yang telah dijadikan contoh dalam pengembangan ASCN di Indonesia yakni DKI Jakarta, Banyuwangi dan Makasar, namun sinergitas atau kerjasama unsur atau bagian dari berbagai daerah di Indonesia sangat diperlukan. Terlebih ketika Indonesia tengah mengembangkan Gerakan Menuju 100 Smart Cities, setiap

Kota atau Daerah digesa untuk melakukan percepatan dan pergerakan menuju Kota Cerdas.

Smart City sendiri merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Smart city adalah konsep Kota Cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. Konsep ini menekankan pada tiga konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien dan ketiga, Smart City diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga. Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada didalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru sejak 2015 telah mencanangkan Kota Pekanbaru sebagai Smart City Madani, dimana ada enam pilar yang menjadi penguatnya, yaitu Smart Governance (Tata Kelola Pemerintah yang Pintar, Smart People (Penduduk yang Pintar).

Selain itu, Smart Economy (ekonomi yang pintar), Smart Environment (lingkungan yang pintar) Smart Living (kehidupan yang pintar), dan Smart Mobility (mobilitas yang pintar).

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisa Implementasi Smart City Madani Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya sinergitas Program ASEAN Smart Cities Network 2030. Adapun pertanyaan penelitian ini sebagai berikut: Analisa strategi konsep Smart City Madani Kota Pekanbaru? Bagaimana hambatan dalam mensinergitaskan Program ASEAN Smart Cities Network 2030 melalui Konsep Smart City Madani Kota Pekanbaru?

## **B. Metode**

Metode Penelitian, berdasarkan problem penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini lebih tepatnya menggunakan metode atau pendekatan deskriptif analitik. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di kota Pekanbaru dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan mempelajari berbagai buku literatur dan dokumen-dokumen terkait dengan *Smart City*.

Teknik Analisa Data Dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersama dengan pengumpulan data. Pada teknik analisis data analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Analisis data terdiri

dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu : Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data.

Penyajian data, adalah proses penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini berarti data yang diperoleh pada saat reduksi data disajikan berdasarkan pikiran, intuisi pendapat atau kriteria tertentu untuk selanjutnya ditempatkan pada kategori masing-masing. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan merupakan kegiatan diakhir penelitian kualitatif. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohnya.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pengertian implentasi kebijakan menurut Mufizz yang dikutip oleh kahya dan Zenju (1996:45) dalam bukunya "Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Suatu Pokok Bahasan)" sebagai berikut: "Implementasi kebijakan ialah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif." Edward III dikenal dengan "direct

and indirect impact on implementation” terdapat empat variable yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu :

1. Komunikasi, merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan public. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.
2. Sumber Daya, Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (resources). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerchorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: “Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People”. Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : “Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies”. Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. Menurut Edward III

dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan.

3. Disposisi, Menurut Edward III dalam Winarno (2005: 142-143) mengemukakan : “Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi.

Dikaitkan dengan sebuah teori yang ditegaskan oleh Edward III terdapat beberapa aspek yang harus mendapat perhatian, berikut implementasi kebijakan dari aspek-aspek tersebut:

### **1. Komunikasi**

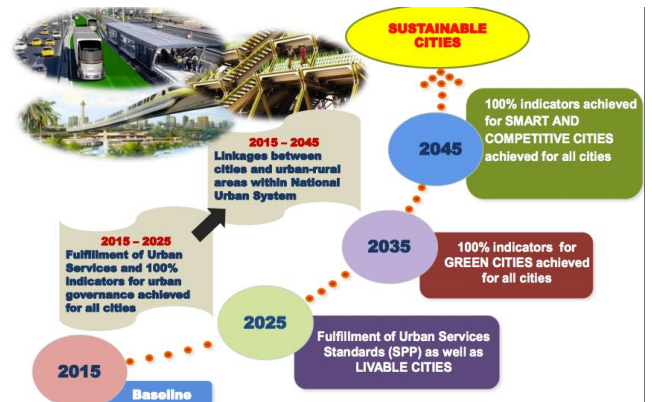
Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk implementasi kebijakan, khususnya komunikasi yang terjalin antar para pelaksana kebijakan baik itu pelaksana dalam satu unit Dinas maupun

pelaksana antar Dinas terkait. Disamping itu, komunikasi harus terjalin dengan baik antara para pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran dalam hal ini adalah seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Implementasi kebijakan yang berjalan baik tidak terlepas dari faktor komunikasi yang baik pula. Komunikasi yang terjalin itu harus mampu menjembatani segala macam bentuk kepentingan, baik antar pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan dan masyarakat. Komunikasi sangat berpengaruh pada terhadap pelaksanaan kebijakan yang akan berdampak pula kepada hasil kebijakan yang akan dicapai.

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana dan tim dan juga antar badan instansi yang terkait sangat penting bagi kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing anggota internal dan antar badan instansi sehingga tidak adanya saling lempar tugas, harus saling seimbang dan jangan mau seandainya.

Peneliti menemukan bahwa kendala yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru terdapat di dalam Roadmap Walikota Pekanbaru, terdapat Roadmap jangka panjang dan jangka pendek. Kendala nya yaitu dalam

mensosialisasikan Roadmap tersebut sehingga beberapa pegawai belum memahami. Berikut merupakan Roadmap Kota Pekanbaru 2015 - 2045 yang dalam hal ini dipublikasikan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru:



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, 2015

Informan mengatakan bahwa: Bentuk sosialisasi mengenai Smart City kepada masyarakat Kota Bandung berupa menyampaikan informasi melalui Media Cetak, Radio, Televisi dan media Sosial Media. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, menemukan

masih banyak masyarakat Kota Pekanbaru yang kurang mengetahui mengenai Smart City tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, mengenai sosialisasi Pemerintah Kota Pekanbaru masih terus berusaha untuk mensosialisasikan Smart City salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan website, sosial media dan lain sebagainya.

## **2. Implementasi Kebijakan Berbasis Teknologi**

Hal lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk mewujudkan Smart City adalah dengan diluncurkannya dua aplikasi. Bertepatan dengan momen ulang tahun ke 232 Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru meluncurkan dua aplikasi pendukung program *smart city* yaitu perpustakaan *online* berbasis aplikasi *moco* dan radio *online*. Selain dua aplikasi yang telah diluncurkan, pemkot akan mengembangkan aplikasi lainnya yang dapat mendukung realisasi program kota pintar untuk meningkatkan pelayanan, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat setempat. Meskipun hingga sekarang hal tersebut belum diketahui secara pasti. Dalam pemanfaatan Big Data, Pemerintah Kota Pekanbaru bersiap untuk *The Urban Nexus Project* yang masuk kedalam *roadmap* Kota Pekanbaru. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bappeda Pekanbaru Drs H Syofian dalam rapat Pertemuan & koordinasi tentang *The Urban Nexus Project* dengan BAPPENAS RI dan GIZ *Germany* selaku pihak yang mempromosikan proyek

tersebut, beberapa waktu lalu. Menurut Syofian, pihaknya akan menjadi *leading Sector*.

*The Urban Nexus Project* adalah model Proyek Pembangunan Perkotaan yang melibatkan beberapa sektor (*Multy Sector Approach*) yang fokus pada Sanitasi, Penyediaan air bersih, Energi, Ketahanan Pangan, dan Penggunaan lahan (*Sanitation, Water, Energy, Food Security and Land use*). Informan menjelaskan bahwa Model Proyek Pembangunan ini di promosikan oleh lembaga Donor dari Jerman yang bernama GIZ, yang membantu negara negara berkembang dalam hal Sanitasi, Penyediaan air bersih, Energi, Ketahanan Pangan, dan Penggunaan lahan. Adapun Keterlibatan GIZ dalam pelaksanaan proyek ini nantinya adalah membantu dalam hal bantuan teknis (*technical assistance*). Bantuan teknis yang diberikan tergantung dari Proposal dan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Di Indonesia ada 3 (tiga) Kota yang diberikan kesempatan untuk membuat proposal proyek pembangunan dengan menggunakan model ini untuk mendapatkan bantuan teknis dari GIZ. Kota-kota tersebut adalah, Kota Pekanbaru, Solo dan Tanjung Pinang. Ketiga kota tersebut akan saling berkompetisi, karena GIZ hanya memilih satu Kota untuk diberikan Bantuan Teknis dan hal tersebut tergantung dari Proposal yang diusulkan. Di awal tahun 2018, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, Firmansyah Eka Putra dalam uji coba aplikasi bank



data di ruang Pekanbaru Command Center (PCC). Bank data ini merupakan inovasi hasil inovasi dari Diskominfo statistik dan persandian Kota Pekanbaru dalam mendukung Pekanbaru Smart City.

Aplikasi bank data ini merupakan inovasi di bidang teknologi yang berfungsi untuk memudahkan menyimpan dan mentransfer data, sehingga dapat diakses kapan dan dimana saja. Aplikasi bank data ini diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diakses langsung oleh pimpinan dan dapat memantau kinerja setiap ASN. Untuk sementara bank data ini diterapkan di lingkungan Diskominfo. Namun ke depan, semua OPD akan menerapkan inovasi serupa. Sehingga saat wali kota Pekanbaru membutuhkan data dari masing-masing OPD bisa langsung didapatkan, tanpa harus menunggu laporan dari kepala OPD-nya.

### **3. Hambatan Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Pekanbaru**

Hambatan yang terjadi pada kebijakan smart city di Kota Pekanbaru bisa dilihat dari beberapa aspek:

1. Komunikasi
  - a. Masih kurangnya penggunaan atau pemanfaatan sistem dan aplikasi yang ada karena pemahaman masyarakat yang kurang.
  - b. Berkaitan dengan sosialisasi yang belum merata mengakibatkan terhambatnya pengimplementasian kebijakan smart city kepada masyarakat serta pihak-pihak yang terkait.

Kurangnya pempublikasian sistem dan aplikasi yang telah dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan sistem maupun aplikasi tersebut.

2. Sumber daya
  - a. Terkait Staff, permasalahan sumber daya terkait sataff berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informasi selaku implementor dari smart city di Kota Pekanbaru masih adanya kendala ataupun permasalahan mengenai staff dimana di Pemkot dan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintahan Kota Pekanbaru masih kekurangan staff di bidang Ilmu Teknologi sedangkan staff yang ahli di bidang ilmu teknologi ini sangat penting demi menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan Smart City yang merupakan sumberdaya yang utama dalam implementasi kebijakan, namun penambahan staff saja tidak cukup dalam menangani permasalahan ini dibutuhkannya staff yang ahli dan mempunyai kemampuan di bidang ilmu teknologi agar tugas dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan pengimplementasian smart city.

Terkait Informasi, permasalahan sumber daya dalam indikator informasi terdapat beberapa kendala seperti masih kurangnya pemahaman petugas terhadap tugas dan fungsi dalam menjalankan program Smart City. Ini menjadi salah satu penghambat keefektifan program smart city dikarenakan koordinasi Pemkot dan Dinas Komunikasi dan Informasi ini tidak semua aparatur paham akan teknologi sedangkan di dinas komunikasi dan informasi sendiri aparatur dituntut untuk paham akan arahan yang diberikan kepala daerah dan paham akan ilmu teknologi mengenai smart city sebagai penunjang dari arahan yang diberikan oleh kepala daerah dalam pelaksanaan program smart city, karena tidak bisa disepelkan lagi aparatur pelaksana smart city harus paham akan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan paham mengenai ilmu teknologi khususnya mengenai program aplikasi-aplikasi penunjang smart city.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan analisa, data dan temuan dilapangan, implementasi kebijakan Smart City di Kota Pekanbaru masih tengah berlangsung baik dari segi peningkatan infrastruktur maupun aplikasi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat berjalan dengan lebih cepat dan lancar jika saja koordinasi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Walikota Pekanbaru dengan beberapa Dinas terkait lebih intens dan berkesinambungan. Ditambah dengan kurangnya sosialisasi ke masyarakat belum massif dan maksimal

membuat implementasi Smart City Madani dirasa tidak tersosialisasi dengan sempurna di tataran masyarakat umum. Padahal, Smart City Madani merupakan salah satu bagian dari roadmap pemerintah dalam meningkatkan perkembangan kota-kota besar di Indonesia, agar dapat bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia Internasional, setidaknya untuk kawasan Asia dan ASEAN yang tengah gencar mensinergikan Program *Asean Smart Cities Network (ASCN) 2030*.

#### **E. Referensi**

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Malik, Dedy Djameluddin., Jalaluddin Rakhmat dan Mohammad Shoelhi, 1993, *Komunikasi Internasional, Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pelatihan Komunikasi (LP3K) bekerjasama dengan PT. Remaja Rosdakarya* : Bandung
- Herdiansyah, Harish. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik*. Bandung: Gava Media.
- Ismail, Nawawi. 2009. *Public Policy*. Surabaya: PMN.
- Kahya, Zenju. 1996. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*.
- Kusumanegara, Solahudin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Bandung: Gava Media.

- Lexy J. Moleong. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahayana, Dimitri, 2010, Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global, Rosda : Bandung
- Plano, Jack C. & Roy Olton, 1999, Kamus Hubungan Internasional, CV. Putra A Bardin : Bandung
- Rahardjo, Budi, 2002, Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet (file dalam format PDF), PT. Insan Infonesia : Bandung & PT. INDOCISC : Jakarta
- Schermerchorn, Jr. 1994. Management. International Studies Version.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Undang-Undang: Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.
- Pasal 386-390 Tentang inovasi Pemerintah Daerah.
- Zaleski, Jeff, 1999, Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagamaan Manusia, Mizan : Bandung